



TROPENBOS INDONESIA PROFILE 2023



**Menjembatani kesenjangan antara pengetahuan
dan praktik lanskap berhutan berkelanjutan**



Sejarah Tropenbos Indonesia

Tropenbos Indonesia (TI) telah berkiprah selama lebih dari 30 tahun sebagai *knowledge broker* (penyebarkan pengetahuan) dengan mengusung *tagline* "**Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat**" dan dengan misi "**Menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dengan praktik tata kelola lanskap berhutan berkelanjutan**". TI terus berupaya meningkatkan praktik penatakelolaan hutan lestari pada berbagai tingkatan, baik dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, maupun di tingkat desa yang bersentuhan langsung dengan praktik pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Awal mula keberadaan TI adalah sebagai Tropenbos International-Indonesia Programme (TBI-IP), lembaga independen nirlaba, bagian dari Tropenbos International (TBI) Network yang kini berkantor pusat di Ede, Belanda. TBI-IP telah aktif berkegiatan dalam pelestarian hutan tropis sejak tahun 1986 di Kalimantan Timur (Kaltim). Kantor awal TBI-IP di Kaltim kini dikenal sebagai Balai Penelitian Teknik Konservasi Sumberdaya Alam di Balikpapan-Samarinda, dengan koleksi herbarium yang penting bagi hutan tropis.

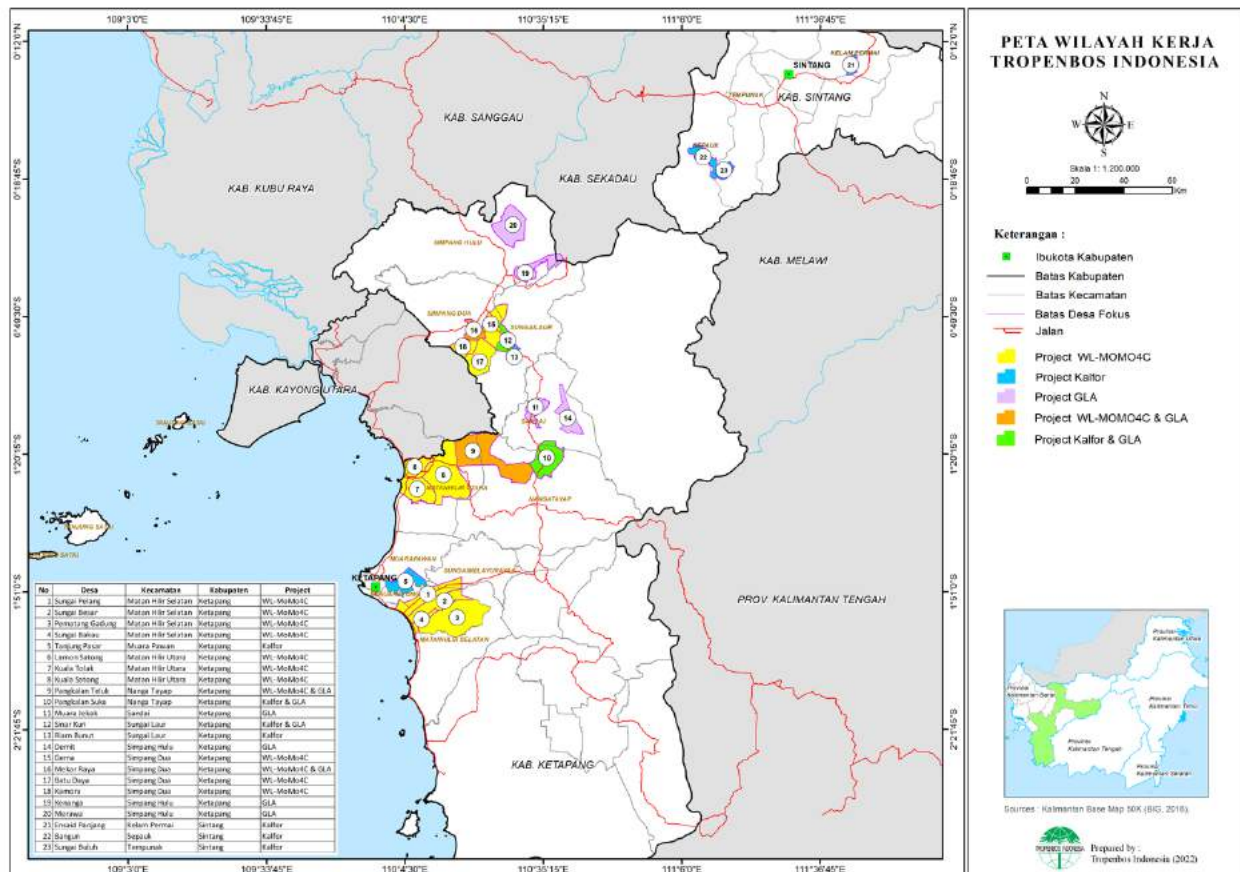
Sejak 2007, TBI-IP memperluas cakupannya dari Kaltim ke seluruh Indonesia dan berganti nama menjadi Tropenbos International Indonesia (TBI Indonesia), dan sejak akhir 2016 resmi berbadan hukum Indonesia dengan nama Tropenbos Indonesia (TI). Pada akhir 2016 itu pula TI mulai bekerja di Kalimantan Barat melalui Program Green Livelihoods Alliance 1.0 untuk meningkatkan kapasitas Civil Society Organizations (CSOs) dalam tata kelola sumber daya alam.

Pada perjalanannya, program-program yang dilaksanakan TI semakin bertambah dan kini program TI meliputi:

1. Program Working Landscape/WL (2019-2023)
2. Program Pencegahan Kebakaran/Fires Program (2021-2023)
3. MoMo4C (Mobilizing More for Climate) untuk mendukung WL Program di bidang bisnis dan pengembangan usaha (2020-2024)
4. Green Livelihoods Alliance (GLA) 2.0 (2021-2025)
5. Kalimantan Forest (Kalfor), yang didanai oleh UNDP dan KLHK (2022-2023)
6. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan melalui penguatan Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH) yang didanai oleh Lestari Capital (2022-2023)

Saat ini pendampingan Tropenbos Indonesia menjangkau 23 desa di wilayah Kalimantan Barat, dengan 32 staf yang berkantor di Bogor maupun di kantor lapangan di Ketapang, Simpang Dua, dan Sandai.

Peta Wilayah Kerja Tropenbos Indonesia di Kalimantan Barat



Daftar Desa Dampingan Tropenbos Indonesia

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Project
1	Sungai Pelang	Matan Hilir Selatan	Ketapang	WL-MoMo4C
2	Sungai Besar	Matan Hilir Selatan	Ketapang	WL-MoMo4C
3	Pematang Gadung	Matan Hilir Selatan	Ketapang	WL-MoMo4C
4	Sungai Bakau	Matan Hilir Selatan	Ketapang	WL-MoMo4C
5	Tanjung Pasar	Muara Pawan	Ketapang	Kalfor
6	Lamon Satong	Matan Hilir Utara	Ketapang	WL-MoMo4C
7	Kuala Tolak	Matan Hilir Utara	Ketapang	WL-MoMo4C
8	Kuala Satong	Matan Hilir Utara	Ketapang	WL-MoMo4C
9	Pangkalan Teluk	Nanga Tayap	Ketapang	WL-MoMo4C, GLA
10	Pangkalan Suka	Nanga Tayap	Ketapang	Kalfor, GLA
11	Muara Jakak	Sandai	Ketapang	GLA
12	Sinar Kuri	Sungai Laur	Ketapang	Kalfor, GLA
13	Riam Bunut	Sungai Laur	Ketapang	Kalfor
14	Demit	Sandai	Ketapang	GLA
15	Gema	Simpang Dua	Ketapang	WL-MoMo4C
16	Mekar Raya	Simpang Dua	Ketapang	WL-MoMo4C, GLA
17	Batu Daya	Simpang Dua	Ketapang	WL-MoMo4C
18	Kamora	Simpang Dua	Ketapang	WL-MoMo4C
19	Kenanga	Simpang Hulu	Ketapang	GLA
20	Merawa	Simpang Hulu	Ketapang	GLA
21	Ensaid Panjang	Kelam Permai	Sintang	Kalfor
22	Bangun	Sepauk	Sintang	Kalfor
23	Sungai Buluh	Tempunak	Sintang	Kalfor

KEGIATAN PENDAMPINGAN TI

PROGRAM WORKING LANDSCAPE

Melalui Program Working Landscape Tropenbos Indonesia bertujuan untuk mempromosikan lanskap cerdas iklim dan berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Cakupan kegiatan program meliputi 3 proposisi, yaitu:

1. Membangun koridor orangutan di kawasan mosaik hutan dan perkebunan kelapa sawit. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah:
 - Menggalang komitmen para pihak melalui Rencana Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Koridor Orangutan 2023-2027, dan berbagai kegiatan lain.
 - Bersama Pemkab dan NGO lokal melakukan L&A kepada sektor swasta untuk melakukan pengembangan ekonomi di tiga desa di sekeliling perusahaan dengan berperan sebagai pembeli produk pertanian masyarakat dan memberikan peningkatan kapasitas, dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan perambahan ke kawasan HCV.
 - Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pemetaan partisipatif dan perencanaan tata guna lahan sesuai dengan potensi wilayah setempat.
 - Mendorong mata pencaharian masyarakat berbasis hutan dan pengembangan ekonomi melalui pertanian organik dan penerapan praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan yang diberikan melalui Sekolah Lapang.
2. Menurunkan risiko kebakaran di kawasan produksi gambut. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah:
 - Pembentukan kelompok kerja para pemangku kepentingan.
 - Penyusunan masterplan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
 - Penguatan kapasitas petani melalui pertanian organik dan penerapan praktik pertanian cerdas-gambut.
 - Bekerja sama dengan Lestari Capital untuk membiayai restorasi dan perlindungan 4 hutan desa di Lanskap Pawan Pesaguan.
3. Mempertahankan sistem agroforestry tradisional dan jasa ekosistem hutan di lahan gambut dan lahan mineral. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah:
 - Perbaikan praktik pertanian untuk meningkatkan hasil produksi lahan petani dan memangkas biaya produksi.
 - Mendorong sistem pertanian menetap dengan metode tanpa bakar.
 - Mendorong kepastian hak atas lahan melalui skema Perhutanan Sosial.
 - Meningkatkan NTFP dan jasa eko wisata.



Highlight Capaian Program WL

1. Sejak Juni 2022 Pemkab Ketapang, beberapa perusahaan kelapa sawit, NGO lokal dan Tropenbos Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendukung tiga desa di sekitar koridor orangutan di dalam konsesi kebun kelapa sawit di Kabupaten Ketapang menuju desa mandiri secara ekonomi, social dan lingkungan. Salah satunya adalah melalui inisiatif kesediaan perusahaan kelapa sawit untuk menyerap produk pertanian organik desa.
2. Sejak Januari 2022, empat perusahaan kelapa sawit dan satu perusahaan HTI bekerja sama untuk melaksanakan patrol kebakaran berbasis masyarakat di sepanjang koridor orangutan.
3. Pada Desember 2022, Pemkab Ketapang telah menyetujui dokumen masterplan kebakaran berbasis pendekatan lanskap di kawasan gambut sebagai dasar bagi terbitnya Peraturan Bupati.
4. Pada 2021 KLHK telah menerbitkan izin pengelolaan Hutan Desa seluas 7,000 ha di Pematang Gadung selama 35 tahun.
5. Sejak Desember 2022, Lestari Capital memberikan komitmennya untuk memberikan pendanaan selama 25 tahun bagi perlindungan, restorasi, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan bagi 3 hutan desa gambut dan 1 hutan desa di lahan mineral seluas total 14.000 ha di Ketapang.
6. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional (BRGM) di Kabupaten Ketapang telah menetapkan Kesatuan Hidrologi Gambut (PHU) Ketapang sebagai prioritas kawasan restorasi gambut nasional, sehingga mendapat perhatian dan dukungan nasional dalam kemitraan BRGM-TI-Pemkab Ketapang; BRGM berkontribusi pada desain sekat kanal untuk pembasahan gambut.
7. Kelompok petani karet di 4 desa telah membentuk wadah pemasaran karet bersama, yaitu UPPB, untuk pemasaran langsung ke pabrik. UPPB telah mengembangkan dokumen organisasinya, standar operasi prosedur, dan membuat rekening bank.
8. Pada Juni 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan izin bagi LDPH Mekar Raya untuk mengelola 1.107 ha Hutan Lindung Gunung Juring selama 35 tahun.
9. Masyarakat Desa Sungai Pelang telah aktif melakukan aksi dalam menghadapi perubahan dan memperoleh Penghargaan Proklamasi (Desa Cerdas Iklim) pada 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
10. Lebih dari 30 petani telah menerapkan praktik pertanian permanen, tanpa bakar, organik. Praktik ini telah terbukti memberikan hasil yang lebih tinggi.



PROGRAM MoMo4C

Melalui Program MoMo4C, Tropenbos Indonesia menyatukan pengusaha, perusahaan, pembuat kebijakan, investor, masyarakat sipil, lembaga dan pengusaha lokal untuk membuat proposisi bisnis hijau yang berkontribusi terhadap upaya menghadapi dampak dan penyebab perubahan iklim di tingkat lanskap dan menarik investasi untuk mengimplementasikan inisiatif ini.

Tiga pilar intervensi MoMo4C adalah:

1. Menciptakan kondisi pendukung – memperkuat komitmen para pemangku kepentingan untuk menerapkan praktik tahan iklim dan konsisten dengan strategi pembangunan lanskap berkelanjutan.
2. Kasus bisnis – memperkuat kerja sama antara masyarakat, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan lokal untuk mengembangkan bisnis tahan iklim untuk menarik investasi publik dan swasta.
3. Menganalisis pembelajaran – mendorong sektor publik dan swasta di dalam dan di luar lanskap untuk menerjemahkan praktik terbaik menjadi kebijakan dan standar.

Diantara kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Memfasilitasi Forum Multi Pemangku Kepentingan untuk mengembangkan Rencana Aksi Iklim di tingkat lanskap.
2. Memfasilitasi Forum Multi Pemangku Kepentingan dan Instansi Pemerintah Daerah untuk mendukung usaha masyarakat yang ramah iklim.
3. Mendorong partisipasi perempuan dalam Forum Multi Pemangku Kepentingan
4. Memfasilitasi prakarsa bisnis yang dipimpin perempuan.
5. Menyelenggarakan KURRI – Kompetisi Usaha Rakyat Ramah Iklim yang melibatkan instansi pemerintah daerah terkait dan lembaga keuangan lokal.
6. Pelatihan bagi UMKM lokal untuk mengembangkan rencana bisnis, fasilitasi intensif untuk mengimplementasikan rencana tersebut, MoMo4C Call – Kompetisi Bisnis Masyarakat Ramah Iklim (CFCBC).
7. Memfasilitasi pembentukan UPPB sebagai unit pengolahan dan pemasaran karet bersama serta pengembangan bisnisnya.
8. Menghubungkan UMKM lokal ke lembaga keuangan dan lebih lanjut ke L&A ke lembaga keuangan lokal (Credit Union) untuk mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai untuk bisnis mikro hijau.
9. Memfasilitasi forum alumni KURRI untuk berbagi praktik terbaik dan pembelajaran
10. Melaksanakan MoMo4C Call 2021 dan 2022.



PROGRAM GREEN LIVELIHOODS ALLIANCE (GLA)

Program Green Livelihoods Alliance (GLA) 2.0 bertujuan agar hutan tropis dan lanskap hutan dapat dikelola secara lestari dan inklusif untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim, memenuhi hak asasi manusia, dan melindungi mata pencaharian lokal.

Tiga jalur (*pathway*) kegiatan GLA adalah:

1. Memperkuat IPLC (Indigenous People and Local Community) atau Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Melalui Program GLA, Tropenbos Indonesia memberikan dukungan bagi IPLC melalui kegiatan:
 - a) Mendukung pemerintah desa dalam melakukan pemetaan partisipatif dan perencanaan tata guna lahan. (Dilaksanakan di 3 desa model, yaitu Desa Kenanga, Sinar Kuri, dan Muara Jekak).
 - b) Sosialisasi mekanisme pelaporan/complain terhadap pelanggaran masalah lingkungan/HAM (Grievance Mechanism).
 - c) Perolehan hak atas lahan melalui skema Perhutanan Sosial, melalui upaya mendorong Pemkab dalam percepatan penerapan skema Perhutanan Sosial dan memasukkannya ke dalam program kabupaten (berkolaborasi dengan Yayasan Sangga Bumi Lestari).
 - d) Formalisasi/pengakuan atas kawasan adat/lahan tradisional melalui registrasi sebagai ICCA (*Indigenous Community Conserved Area*). Telah berhasil didaftarkan sebagai ICCA – Desa Mekar Raya, dan selanjutnya adalah Desa Kenanga dan Muara Jekak.
 - e) Pengembangan mata pencaharian yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.
2. Menghambat penyebab deforestasi melalui kegiatan:
 - a) Mendukung perusahaan dalam mematuhi peraturan dan standar sertifikasi.
 - b) Mendukung petani kelapa sawit mandiri dalam memenuhi persyaratan dan standar sertifikasi (ISPO) dan pengajuan STDB sebagai prasyarat sertifikasi.
 - c) Mendukung Pemkab Kayong Utara dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (bersama dengan Sawit Watch).
 - d) Membantu Pemkab Kayong Utara dalam pemetaan petani kelapa sawit mandiri.
 - e) Meningkatkan kapasitas petani sawit mandiri dalam menerapkan praktik pertanian yang baik (GAP) melalui Sekolah Lapang.
3. Mendukung pejuang lingkungan dan HAM termasuk perempuan pejuang lingkungan dan HAM dengan memberikan pelatihan menggunakan metode FPAR (Feminist Participatory Action Research). Enam perempuan dari 6 desa model GLA telah mendapatkan pelatihan dan telah meneruskan apa yang mereka peroleh dari pelatihan yang mereka ikuti kepada para perempuan lain di desanya. Mereka yang telah menerima pelatihan ini diharapkan mengalami perubahan/transformasi dalam keterlibatannya terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di desa masing-masing.
- 4.



PROGRAM KALFOR (2022-2023)

Melalui Proyek Hutan Kalimantan (Kalfor Project), Tropenbos Indonesia mendukung program pemerintah dalam menjaga hutan yang tersisa di luar kawasan Hutan Negara melalui penguatan perencanaan pengelolaan hutan dalam menyelamatkan dan melindungi hutan (di luar kawasan hutan) dan jasa ekosistem serta keanekaragamannya yang bernilai tinggi. Melalui proyek ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan, termasuk pengelolaan dan perlindungan hutan di dalam perkebunan untuk mendukung pengelolaan hutan tanaman berkelanjutan secara global yang memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim.

Area fokus proyek ini adalah tiga desa di Kecamatan Sintang (Desa Ensaid Panjang, Desa Bangun, Desa Sungai Buluh) dan empat desa di Kecamatan Ketapang (Desa Sungai Kuri, Desa Riam Bunut, Desa Pangkalan Suka, Desa Tanjung Pasar). Proyek yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PKTL - KLHK) ini memperoleh pendanaan dari Global Environmental Facility (GEF) United Nations Development Program (UNDP).

Diantara kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan hibah untuk:

1. Mendukung bisnis masyarakat dan pengusaha lokal untuk meningkatkan bisnis mereka sebagai langkah-langkah mitigasi untuk menghindari dampak negatif dari pilihan mata pencaharian masyarakat terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem termasuk hilangnya HCV, deforestasi, dan eksploitasi berlebihan dari kawasan hutan yang tersisa.
2. Memberikan alternatif pilihan mata pencaharian yang berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat yang diberi pelatihan dapat memulai kembali atau memulai usaha dan mengikuti kompetisi untuk mendapatkan lebih banyak dukungan.



KEDEPAN

- 1 Tantangan utama koridor orangutan adalah membawa inisiatif Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di perkebunan kelapa sawit sebagai upaya menuju pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca NDC (*Nationally Determined Contribution*) pada 2030. Dalam rangka mengarusutamakan KBKT agar perkebunan kelapa sawit meningkatkan pengelolaan dan perlindungan KBKT sebagai kontribusi terhadap NDC, TI akan bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyusun perangkat operasional pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KBKT. Dalam kerangka kerja tersebut, TI akan melanjutkan upaya peningkatan kapasitas pemantauan dan evaluasi KBKT kepada Dinas Perkebunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan dan direplikasi ke tingkat nasional.
- 2 Dalam rangka mengarusutamakan KBKT agar perkebunan kelapa sawit meningkatkan pengelolaan dan perlindungan KBKT sebagai kontribusi terhadap NDC, TI bersama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dan pemangku kepentingan lain di tingkat provinsi akan merumuskan Keputusan Gubernur mengenai kerangka peraturan untuk pemantauan dan evaluasi KBKT konsesi perkebunan kelapa sawit skala besar dan memasukkannya sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan. Untuk itu, TI akan melanjutkan upaya penguatan kapasitas Dinas Perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk pemantauan dan evaluasi KBKT. Dalam jangka panjang, model ini diharapkan dapat menjadi acuan dan direplikasi ke tingkat nasional.
- 3 TI akan melanjutkan keterlibatan dan kolaborasi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang akan meneruskan implementasi rencana kerja di lanskap Pawan-Kepulu-Pesaguan. Semua aktor terkait memiliki pendekatan yang sama dalam mengatasi kebakaran lahan gambut di lanskap, yaitu pembasahan, revegetasi, dan revitalisasi. TI akan mengadvokasi mekanisme operasional Good Agricultural Practices untuk kelapa sawit di lanskap gambut. Peran TI di lanskap ini diakui sebagai bagian dari program nasional restorasi lahan gambut untuk mengurangi kejadian kebakaran yang berkontribusi terhadap pencapaian NDC dari sektor lahan gambut.
- 4 Saat ini TI sedang menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pencegahan Kebakaran melalui Restorasi Lahan Gambut di lanskap Pawan-Kepulu-Pesaguan, ini adalah pendekatan satu-satunya/ pertama? yang diambil oleh lembaga non-pemerintah untuk melindungi lahan gambut yang terdegradasi. TI akan memperluas Rencana Induk ke kawasan lahan gambut lain di Kabupaten Ketapang.
- 5 TI akan memperkuat Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) di 4 (empat) desa di Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang untuk menyediakan pasokan karet berkualitas tinggi dan memperkuat kerjasama dengan pabrik karet. Penguatan UPPB secara kelembagaan akan dilakukan dengan melibatkan lebih banyak petani karet dari desa tetangga yang akan meningkatkan suplai karet berkualitas tinggi dengan harga premium. Selain itu, TI juga bertujuan mengembangkan unit pemasaran kolektif untuk komoditas sekunder dengan sistem pertanian agroforestri sebagai upaya mendorong diversifikasi pendapatan petani. TI juga akan memulai kerjasama untuk menghubungkan UPPB dengan lembaga keuangan yang akan menyalurkan pinjaman modal usaha dan investasi.

- 6 Selain UPPB untuk komoditas karet, TI akan memfasilitasi para petani juara mengembangkan unit pemasaran kolektif produk organik yang dipanen dari lahan pertanian permanen tanpa bakar yang menargetkan pasar baik di dalam maupun di luar lanskap.
- 7 TI telah berhasil mendapatkan pendanaan untuk perlindungan 4 (empat) Hutan Desa di Kabupaten Ketapang melalui skema pembiayaan Lestari Capital-Rimba Collective. TI juga berupaya menghubungkan Hutan Desa di lanskap Simpang Dua di bawah skema pendanaan Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP). Skema pembiayaan ini mencakup implementasi restorasi, perlindungan, dan penguatan rencana kerja tata kelola hutan desa, serta mempertahankan dan mengembangkan berbagai usaha berbasis hutan.
- 8 TI terus melakukan pemetaan partisipatif dan perencanaan penggunaan lahan partisipatif di batas desa atau kawasan konservasi adat untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan informasi yang tepat diperoleh di tingkat akar rumput dalam rangka mendapatkan hak tenurial melalui skema Perhutanan Sosial dan ICCA (Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal). Proses partisipatif dalam perencanaan tata guna lahan akan memastikan kepentingan para pemangku kepentingan dapat didengar saat mengadopsi perencanaan yang 'hijau' dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Tropenbos Indonesia
tropenbos@tropenbos-indonesia.org

Dr. Edi Purwanto
edipurwanto@tropenbos-indonesia.org



Menjembatani kesenjangan antara pengetahuan
dan praktik tata kelola lanskap berhutan berkelanjutan

Bogor Office
Taman Cimanggu
Jl. Akasia I Blok P1 No.6
Tanah Sareal, Bogor 16163
✉ tropenbos@tropenbos-indonesia.org
☎ +62 251 8316156

Ketapang Office
Jl. Letjen S. Parman Gg. Lobak No.9B,
Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan
Ketapang 78811

 tropenbos-indonesia.org
 Tropenbos Indonesia
 Tropenbos Indonesia
 @TropenbosID
 tropenbos_id